



PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Sarastanto Aulia Heru Pranoto^{1*}, Dewi Sri Handayani², Fandil³,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

sarastanto@stiesemarang.ac.id

Riwayat Artikel

Received : 20 Mei 2025

Revised : 17 Juni 2025

Accepted : 21 Juli 2025

Kata Kunci

Upah Minimum Regional, Jumlah Penduduk, Pajak Bumi dan Bangunan, Regresi Linier Berganda

Abstraksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) dan jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang pada tahun 2021–2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden, yang ditentukan dengan teknik random sampling berdasarkan rumus Slovin.

Hasil analisis menunjukkan bahwa UMR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Sementara itu, jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan PBB. Namun, secara simultan, UMR dan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Kecamatan Semarang Selatan. Koefisien determinasi (Adjusted R^2) menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variasi penerimaan PBB sebesar persentase yang cukup tinggi.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan dinamika UMR dalam kebijakan peningkatan penerimaan pajak daerah serta memperhatikan pola pertumbuhan penduduk sebagai faktor pendukung dalam jangka panjang.

Abstract.

This study aims to analyze the effect of the increase in the Regional Minimum Wage (UMR) and the number of residents on the revenue of Land and Building Tax (PBB) in South Semarang District, Semarang City in 2021–2023. This study uses a quantitative method with a descriptive approach and multiple linear regression analysis. Primary data were obtained by distributing questionnaires to 100 respondents, which were determined by random sampling techniques based on the Slovin formula.

The results of the analysis show that UMR has a positive and

significant effect on PBB revenue with a significance value of <0.05 . Meanwhile, the number of residents does not have a significant partial effect on PBB revenue. However, simultaneously UMR and population have a significant effect on PBB revenue in South Semarang District. The coefficient of determination (Adjusted R^2) shows that the independent variables are able to explain the variation in PBB revenue by a fairly high percentage.

Keyword:

Regional Minimum Wage, Population, Land and Building Tax, Multiple Linear Regression

Based on these findings, it is recommended that local governments consider the dynamics of UMR in policies to increase regional tax revenue and pay attention to population growth patterns as supporting factors in the long term.

PENDAHULUAN

Salah satu jenis pajak yang dapat diandalkan adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, dalam hal ini harta tak bergerak sebagai objeknya, sehingga yang terpenting dalam PBB adalah objeknya bukan status orang atau badan yang dijadikan subjek (Sumitro dan Muttaqin, 2021). Pengertian tersebut menegaskan bahwa status seseorang atau penduduk ia harus tetap membayar PBB jika ia memiliki bumi/tanah dan atau bangunan.

Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat diperlukan, menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh I Nyoman Normal (2023) disimpulkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB, jadi faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi pemabayaran pajak salah satunya adalah pendapatan atau upah wajib pajak.

Besar kecilnya Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) itu sendiri. Dalam hal ini tanah dan bangunan. Sesuai dengan hukum permintaan yang berbanding lurus, maka besar kecilnya NJOP dipengaruhi oleh permintaan, dan permintaan akan tanah dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak permintaan ini dapat menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah sehingga dapat mempengaruhi penerimaan PBB.

Sedangkan jumlah penduduk di kota Semarang semakin bertambah dan tingkat kepadatan penduduknya paling tinggi se Jawa Tengah adalah kota Semarang. Kota Semarang merupakan Ibukota Jawa Tengah, sehingga banyak penduduk yang bertempat tinggal di Kota Semarang. Sedangkan peneliti mengambil sampel di wilayah kecamatan Semarang Selatan dengan jumlah penduduk 62.030 (*Badan Pusat Statistik Kota Semarang*). Adapun jumlah pembayaran wajib pajak di kecamatan Semarang Selatan yang berjumlah 10 kelurahan dengan jumlah wajib pajak sekitar 16.179 dengan jumlah penduduk di

kecamatan semarang selatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang membayar pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Distribusi Frekuensi Jumlah Penduduk Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jenis Penduduk	Presentase
1	2021	62.030	34%
2	2022	61.616	33%
3	2023	61.212	33%

Sumber : Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa penduduk di kecamatan Semarang Selatan pada tahun 2021 sebesar 34 % atau 62.030 penduduk, penduduk di kecamatan Semarang Selatan pada tahun 2022 sebesar 33 % atau 61.616 penduduk, sedangkan penduduk di kecamatan Semarang Selatan pada tahun 2023 sebesar 33 % atau 61.212 penduduk. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk terpadat yaitu pada tahun 2021 yaitu sebesar 62.030.

Table 1.2

Distribusi Frekuensi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Penduduk	Presentase
1	15-20 tahun	5263	11%
2	21-25 tahun	7534	16%
3	26-30 tahun	15814	33%
4	>30 tahun	18689	40%
	Jumlah	47300	100 %

Sumber : Data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa jumlah penduduk yang sudah bekerja yang berusia antara 15 sampai usia 20 tahun sebesar 11 % atau 5.263 penduduk, jumlah penduduk berusia antara 21 sampai dengan 25 tahun sebesar 16 % atau 7.534 penduduk, jumlah penduduk berusia antara 26 sampai dengan 30 tahun sebesar 33 % atau 15.814 penduduk, jumlah penduduk lebih dari 30 tahun sebesar 40 % atau 18.689 penduduk. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk lebih dari 30 tahun.

Penelitian ini mengambil sampel di wilayah Kota Semarang karena merupakan Kota dengan potensi pendapatan daerah yang cukup tinggi, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkannya adalah dengan mengefektifkan faktor-faktor yang membuat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat, beberapa diantaranya adalah dengan Jumlah Upah Minimum Regional yang setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah inflasi di wilayah Kota Semarang akan mengakibatkan pendapatan dari masyarakat juga akan meningkat dan

diharapkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga akan meningkat, (Nanang Rohadi, 2020). Pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap waktu selalu meningkat seiring dengan meningkatnya angka kelahiran di Kota Semarang mengakibatkan permintaan akan tanah dan atau bangunan juga akan meningkat dan diharapkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga akan meningkat, Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang juga akan selalu mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat yang menjadikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dan diharapkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam penelitian (Irfan, 2019) dengan judul Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menunjukkan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi dapat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Menurut Judiseno sebagaimana dikutip oleh Yahya Hamja (2020) dalam penelitiannya dengan upah minimum kabupaten akan dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, karena dengan naiknya upah minimum kabupaten berarti pendapatan masyarakat meningkat. Jumlah penduduk yang semakin meningkat pula akan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, apabila masyarakat telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan maka pendapatan masyarakat akan semakin meningkat.

KAJIAN PUSTAKA

Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Regional Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMR) terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Normal (2003) yang menyimpulkan pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB. Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Nicola Putra Margono, Aji Sofyan Effendi Dan Erwin Kurniawan yang dilakukn pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Samarinda” dan hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifkn terhadap pajak bumi dan bangunan, maka

hanya jumlah penduduk yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Samarinda.

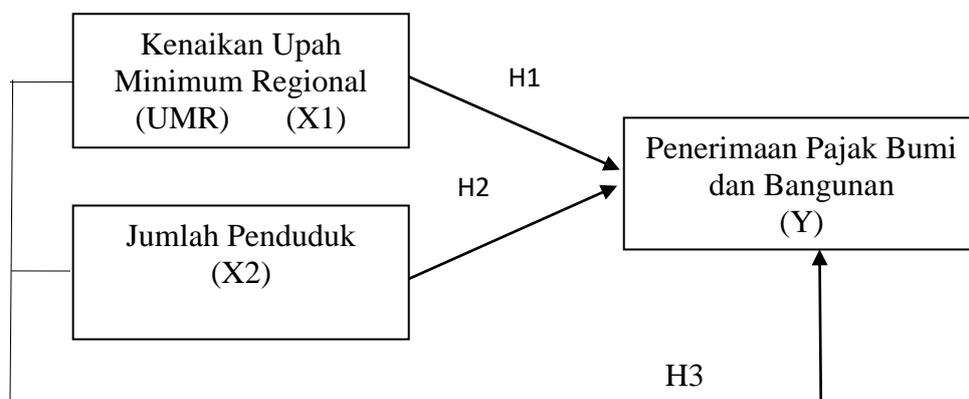
Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Lourdes Neuza Reis Lopes Belo pada tahun 2018 dengan judul penelitian “ Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Yogyakarta Tahun 2015-2018” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa upah minimum kabupaten berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten atau kota provinsi yogyakarta, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan di provinsi yogyakarta

H1 : Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh secara positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kerangka Pemikiran

Peranan Pemerintah Daerah akan semakin besar dalam pembangunan daerah, hal ini pertanda adanya perubahan pengelolaan fiskal yang sangat mendasar, bergerak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, yang kemudian sering disebut dengan Desentralisasi Fiskal. kemerosotan dan kelemahan secara signifikan, sehingga perusahaan perlu mempertahankan penjualan mereka agar perusahaan dapat tetap bertahan.

Meski kedua Undang-Undang tersebut cukup memberikan angin segar bagi daerah untuk pelaksanaan Otonomi Daerah, namun daerah perlu memperhatikan segala implikasinya adalah tuntutan bagi pemerintah daerah untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah secara efektif dan efisien akan sangat tergantung pada tersedianya sumber daya pendukungnya.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Selatan

Penduduk merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah, hal ini dikarenakan penduduk memiliki peran aktif sebagai pelaku pembangunan, semakin besar peranan penduduk dalam pembangunan daerah maka tingkat kualitas kehidupan di daerah tersebut akan meningkat pula. Tingkat pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu yang mengalami peningkatan, dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang meningkat akan berpengaruh kepada pajak bumi dan bangunan. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini dikarenakan banyaknya Jumlah penduduk. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Doly Tasda(2020) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota

H2 : Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan

Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Kabupaten dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Semarang Selatan

Dengan meningkatnya upah minimum kabupaten maka pendapatan masyarakat akan meningkat, dan dengan meningkatnya jumlah penduduk maka permintaan akan tanah akan meningkat. Apabila keduanya mengalami kenaikan secara bersamaan maka penduduk akan memenuhi kebutuhannya (tanah) yang menyebabkan permintaan akan tanah akan naik sehingga NJOP tanah akan naik, dan dengan meningkatnya upah minimum kabupaten yang menyebabkan kenaikan pendapatan penduduk maka penduduk akan memenuhi kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan sehingga dapat mempengaruhi penerimaan PBB. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yahya Hamja (2020) dengan judul pengaruh kenaikan upah minimum provinsi dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

H3 : Kenaikan upah minimum regional dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Definisi Operasional

Populasi penelitian ini adalah warga kelurahan yang ada di kecamatan Semarang Selatan yang berjumlah 61.212 orang. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel Random Sampling karena pengambilan anggota populasi dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan starata yang ada dalam populasi itu. Menurut Slovin untuk menentukan besarnya sampel dicari dengan rumus:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Total populasi

e : Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel, dalam penelitian ini sebanyak 10%

Pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir yaitu (0,1) Jika diketahui jumlah populasi jumlah penduduk Kota Semarang Kecamatan Semarang Selatan, periode 2021 sampai 2023 sebesar 61.212 penduduk, maka jumlah sampel dapat dihitung sebagai berikut: $n = N / (1 + N e^2) = 61.212 / (1 + 61.212 \times 0.1^2) = 99,83$ dari perhitungan rumus di atas besaran sampel sebesar 99,83 dan dibulatkan sebanyak 100 responden.

Definisi operasionalisasi merupakan suatu definisi yang memberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau spesifikasi bagaimana variabel atau kegiatan tersebut dapat diukur adapun jenis operasionalisasi variabel pada penelitian ini meliputi: (1) Upah Minimum Regional (UMR) adalah Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu (BPS, 2022). UMR yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum regional yang berlaku di Kota Semarang tahun 2021-2023 yang diukur dalam satuan rupiah. Data diambil dari BPS, (2) Jumlah Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Perhitungan jumlah penduduk setiap tahunnya menggunakan proyeksi dari sensus penduduk setiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk di kecamatan Semarang selatan pada tahun 2021-2023 yang dihitung pada satuan jiwa penduduk. Data diambil dari BPS, dan (3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah penerimaan yang berasal dari pajak bumi bangunan yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah. Ada beberapa indikator dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut, (Pratama, 2020) yaitu : Penentuan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Target penerimaan yang tidak

tercapai, serta Faktor-faktor penyebab meningkatnya jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definsi Variabel	Indikator
Upah Minimum Regional (X ₁)	Batas terendah dari penerimaan pekerja atau karyawan (dalam satuan rupiah) yang dibayar perusahaan atau kantor pada suatu daerah. Pasal 24 ayat (1) PP 51/2023. (Soedarjadi)	-Pendapatan Upah Minimum Regional Semarang Tahun 2021-2023. - Status kepegawaian - Waktu kerja dalam sehari (Soedarjadi)
Jumlah Penduduk (X ₂)	Merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk. (Karl Marx)	- Pertumbuhan penduduk - Kemiskinan penduduk - Pertumbuhan ekonomi (Karl Marx)
Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Penerimaan yang berasal dari pajak bumi bangunan yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah (Pratama,2020)	- Penentuan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan - Target penerimaan yang tidak tercapai - Faktor-faktor penyebab meningkatnya jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak (Pratama,2020)

Sumber : Artikel Penelitian, 2023

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda, yaitu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variable bebas terhadap variable. Model regresi linier berganda dengan memakai program *software* SPSS 22.00 for windows yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Di mana :

Y = Variabel terikat (citra perusahaan)

X₁ = Variabel bebas (kualitas pelayanan)

X₂ = Variabel bebas (kepuasan konsumen)

a = Konstanta

b_{1,2} = Koefisien Regresi

e = *Standart error* (tingkat kesalahan) yaitu 0,1 (10%)

Uji Hipotesis

1) Uji Simultan (Uji F)

Uji F, dengan maksud menguji apakah secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, dengan tingkat keyakinan 90% ($\alpha = 0,1$).

2) Uji Parsial (Uji t)

Uji t statistik dimaksudkan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan, dengan tingkat keyakinan 90% ($\alpha = 0,1$).

3) Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan dari model yang dipakai. Koefisien detreminasi (adjusted R²) yaitu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan varians atau penyebaran dari variabel-variabel bebas yang menerangkan variabel terikat atau angka yang menunjukkan seberapa besar variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Besarnya koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1 ($0 < \text{adjusted R}^2 < 1$), dimana nilai koefisien mendekati 1, maka model tersebut dikatakan baik karena semakin dekat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan rumus sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100 \%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi yang dicari

r² = Koefisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji analisis linier berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, yaitu teknik analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.5
Hasil uji analisis Linier berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,939	4,203		1,889	,062

UMR	2,254	,635	1,146	3,548	,061
JumlahPenduduk	-1,106	,656	-,545	-1,686	,095

a. Dependent Variable: PBB

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,632 ^a	,399	,387	8,811

a. Predictors: (Constant), JumlahPenduduk, UMR

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X1, X2 mendapatkan nilai R Square sebesar 0.399. nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1,X2X3 terhadap variabel Y adalah sebesar 39,9% sedangkan kurang lebih 60% dipengaruhi variabel lain.

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini terdiri dari 3 hipotesis. Untuk mengetahui apakah hipotesis didukung oleh data atau tidak, maka nilai Significancy dibandingkan dengan nilai $\leq \alpha = 0,05$. Apabila Standardized Koefisien parameter bernilai positif dan nilai probabilitas kurang dari $\leq \alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian didukung oleh data (terbukti secara signifikan). Berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1480,824	6085,408		,243	,809
	X1	-1,206	5,784	,836	11,208	,043
	X2	4,008	,895	,000	11,480	,025

a. Dependent Variable: Y

No	Hipotesis	Sig	t	Hasil
1.	H1: UMR (X1) berpengaruh Positif terhadap PBB (Y)	0,043	11,208	Hipotesis diterima
2.	H ₂ : Jumlah Penduduk (X2), berpengaruh Positif terhadap PBB (Y)	0,025	11,480	Hipotesis diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel 4.9
Hasil uji koefisien determinasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5000,632	2	2500,316	32,208	,000 ^b

Residual	7530,118	97	77,630	
Total	12530,750	99		

a. Dependent Variable: PBB

b. Predictors: (Constant), JumlahPenduduk, UMR

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y secara signifikan.

Pembahasan

Pengaruh kenaikan nilai Upah Minimum Regional (UMR) terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil uji hipotesis pertama yaitu variabel UMR diketahui bahwa berpengaruh terhadap PBB dengan koefisien regresi sebesar 0,635 dengan tingkat signifikansi 0,043 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hasil penelitian hipotesis kesatu (H1) terdukung. Dengan demikian kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dapat meningkatkan penerimaan PBB, karena dengan naiknya Upah Minimum Propinsi berarti pendapatan masyarakat meningkat, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka masyarakat akan berusaha memenuhi kewajibannya.

Pengaruh jumlah kenaikan penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil uji hipotesis pertama yaitu variabel jumlah penduduk diketahui bahwa berpengaruh terhadap PBB dengan koefisien regresi sebesar 0,658 dengan tingkat signifikansi 0,025 lebih kecil dari 0,05.

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, yang berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Insukindro (2018) peningkatan pendapatan nasional tersebut akan menciptakan wajib pajak baru, jadi Insukindro menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk bila ditangani dengan serius akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Tapi jika penambahan penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas maka jumlah penduduk hanya akan menjadi beban negara dan tidak akan menghasilkan atau menambah wajib pajak yang baru. Semakin meningkatnya kegiatan pemerintah berarti semakin besar pula pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah tersebut yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum, tidak saja meliputi kegiatan pemerintahan saja, namun juga berkaitan dengan pembiayaan kegiatan

perekonomian, dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum.

Fungsi dan peran pemerintah dewasa ini dapat dikelompokkan dalam tiga fungsi yaitu 1.) Fungsi alokasi, 2.) Fungsi Distribusi, 3.) Fungsi Stabilisasi. Fungsi alokasi adalah Semula barang dan jasa itu dihasilkan oleh swasta dan di jual di pasar. Namun dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, ada barang dan jasa yang tidak dapat disediakan swasta di pasar, barang dan jasa itu dikenal dengan nama barang dan jasa publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Barang dan jasa tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai wakil masyarakat dan mengetahui barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat selain barang dan jasa yang disediakan oleh swasta. Musgrave: (2019) mengemukakan bahwa proses pengalokasian barang-barang publik bukanlah hal yang mudah karena keterbatasan anggaran. Jumlah penduduk bisa tetap ditangani dengan serius, agar seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah juga wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pengaruh kenaikan Upah minimum Regional (UMR) dan jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil uji hipotesis pertama yaitu variabel jumlah penduduk diketahui bahwa berpengaruh terhadap PBB dengan tingkat signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik berupa barang ataupun jasa. Salah satu pajak dalam negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No.12 tahun 1985. Kemudian UU ini diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 dan mulai dihitung 1 Januari 1995.

Pajak merupakan iuran wajib pajak yang dibayar oleh rakyat dengan dasar hukum yang jelas dan dikelola oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Peran pajak dalam suatu negara adalah sebagai salah satu pendapatan negara yang dapat menjadi asset negara. Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 adalah merupakan Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan

Bangunan ini merupakan pajak obyektif atau kebendaan, yang dibayar oleh pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak dan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Ditinjau dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (mengatur). Fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembanguana, sedangkan fungsi regularend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, dari kedua fungsi ini, pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peran penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Resmi, 2014:230).

Penduduk dan upah regional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah, hal ini dikarenakan penduduk memiliki peran aktif sebagai pelaku pembangunan, semakin besar peranan penduduk dalam pembangunan daerah maka tingkat kualitas kehidupan di daerah tersebut akan meningkat pula. Tingkat pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu yang mengalami peningkatan, dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang meningkat akan berpengaruh kepada meningkatnya pertumbuhan perekonomian penduduk. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah penduduk.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nicola Putra Margono, Aji Sofyan Effendi Dan Erwin Kurniawan yang dilakukn pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Samarinda” dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifkn terhadap pajak bumi dan bangunan, maka hanya jumlah penduduk yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Samarinda. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Lourdes Neuza Reis Lopes Belo pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Pengaruh Upah Minimum Kabupaten Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Yogyakarta Tahun 2014-2017” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa upah minimum kabupaten berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten atau kota provinsi yogyakarta, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan di provinsi Yogyakarta.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Berdasarkan hasil penelitian dari variabel Upah Minimum Regional (UMR) dan penerimaan PBB berpengaruh secara signifikan, dikarenakan koefisien regresi sebesar 0,635 dengan tingkat signifikansi 0,043 lebih kecil dari 0,05, (2) Kenaikan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB dengan koefisien regresi sebesar 0,658 dengan tingkat signifikansi 0,025 lebih kecil dari 0,05, dan (3) Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) dan jumlah penduduk berpengaruh dengan tingkat signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05 terhadap penerimaan PBB.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan di atas, untuk saran yang diharapkan dapat di pertimbangkan oleh pihak-pihak terkait yang membutuhkan : (1) Bagi peneliti selanjutnya, yang ingin melakukan penelitian dengan judul masalah yang sama, sebaiknya untuk mencari variabel yang dapat berhubungan dengan penerimaan PBB yang belum disajikan dalam penelitian ini, seperti: luas sawah yang di teliti oleh Heriyanto (2001) dan Nyoman Normal (2003), PDRB dan inflasi yang di teliti oleh Ari Budhiharjo (2003), kesadaran pemahaman WP, sikap WP, dan sistem pemungutan yang di teliti oleh Tituk Diah Widajantie (2005), dan Jumlah wajib pajak yang diteliti oleh Mutia Amana Nasiti (2008), dan (2) Bagi pemerintah, harus menyalurkan pendapatan terutama upah minimum regional secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas atas hingga kelas bawah agar mendapatkan hasil yang sama dari pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohadi , 2020. Pengaruh UMR, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan PBB-P2 di Kota Kediri. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 1(2), 66–72.
- Dandy, S., & Kurniawan, 2017. Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Nilai Jual Objek Pajak, dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Kulon Progo. 1–12.
- Guntur M, 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Jambi (Vol. 8, Issue 5).
- Haris A, 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Gowa. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Kosasi, J., & Barus , A. C, 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi

- Sumatera Utara. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 7(2), 119–128.
<https://doi.org/10.55601/jwem.v7i2.524>
- Agustina, S., Susetyo, D., & Yunisvita, 2016. Pengaruh PDRBPerkapita, Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 22–30.
- Badan Pusat Statistik, 2022. Jawa Tengah dalam Angka 2022.
- Badan Pusat Statistik, 2022. Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa), 2020-2022. <https://sulut.bps.go.id/indicator/12/958/1/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-kotasemarang.html>
- Badan Pusat Statistik, 2022. Realisasi Pendapatan penduduk kota semarang. In Bps.Go.Id (IssueJuly). <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-jateng.html>
- Badan Pusat Statistik. 2023, Kepadatan Penduduk. <https://www.bps.go.id/index.php/istilah/index?Istilah%5Bkatakarian%5D=kepadatan+penduduk&yt0=Tampilkan>
- Febrianti, 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi PenerimaanPajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di KabupatenBangka Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 56–65.
- Kadir, A., Isnaini, & Angelia, N. 2020. The Establishment Policy Model of SaleValue of Land Tax Objects and Rural and Urban Sector Buildings (NJOPPBB P2) in Medan. *Budapest International Research and Critics Institute*, 3(3), 2421–2433. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1216>
- Panjaitan, W. M., Damanik, D., & Tumanggor, B. 2020. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di KotaPematangsiantar Tahun 2000 – 2019. *EKUILNOMI:Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 49–59.
- Yahya Hamza, 2018. Pengaruh kenaikan upah minimum propinsi (UMP) dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak Bumi dan Bagunan (PBB) di Jakarta Selatan.
- Tutut Dewi Astuti, 2018. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta Tahun 2014-2017.
- Wiradinata, Lucky, 2018. Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kenaikan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tangerang (Studi kasus pada kecamatan di kota tangerang tahun 2016-2018).
- N Rohadi, 2018. Pengaruh UMR Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan PBB-P2 di Kota Kediri.
- T Christovina, 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk, Belanja Modal, Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Hananto Arif Rohman, 2019. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember.
- Harlina, 2019. Pengaruh Tingkat Pendapatan Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Permas, Manda Widya 2020. Pengaruh Faktor-Faktor yang Melekat pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Sukabumi.
- A Sitanggang, 2023. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Daerah Istimewa Yogyakarta
- Inkusudiro. 2018. Sindrum R2 Dalam Analisis Regresi Linier Runtut Waktu. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 13, Nomor 4.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2019). Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Penerbit Erlangga.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Nicola Putra Margono, Aji Sofyan Effendi, Erwin Kurniawan. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Banguna Di Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM).